



PEMERINTAH  
PROVINSI  
RIAU

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU (LKJiP) TAHUN 2019



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah salah satu kewajiban perangkat daerah di Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan salah satu indikator pencapaian kinerja pada Unit kerja dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat gambaran pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kerja Utama dan Sasaran Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada Revisi RENSTRA yang selaras dengan Revisi RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019.

Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat atas pertanggungjawaban kinerja serta sebagai umpan balik dalam peningkatan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

**Pekanbaru, 10 Februari 2020**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



**SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19751001 199503 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Gambaran Umum Organisasi .....	2
E. Kondisi Strategis .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. Rencana Strategis (Renstra) .....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
A. CAPAIAN KINERJA .....	13
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA .....	15
C. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN KEGIATAN .....	24
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>29</b>

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 merupakan instrument pertanggungjawaban dalam pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selama menjalankan tugasnya “mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan Program Sekretariat, Perbendaharaan dan Kas daerah, Akuntansi dan Pelaporan, Anggaran Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah”.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 melaksanakan 64 (enam puluh empat) kegiatan dalam 7 (tujuh) program untuk mencapai sasaran-sasaran strategis. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut disediakan anggaran sebesar Rp. 26.080. 780.472,50,- (Dua puluh enam milyar delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang berasal dari dana APBD. Capaian kinerja selama tahun 2019 menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau mencapai rata-rata realisasi keuangan sebesar 82,31 % dan realisasi fisik sebesar 84,45 %.

Adapun kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2019 ini, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja di masa-masa yang mendatang. Berbagai langkah akan ditempuh oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019, merupakan salah satu kewajiban Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja dilingkungan BPKAD Provinsi Riau.

### **B. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 92).

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Penyusunan LkjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 adalah :

1. Memantau dan mengendalikan Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Revisi Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
4. Sebagai salah satu alat ukur dan indikator untuk menentukan perencanaan kegiatan di tahun mendatang.

### **D. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

#### **1. Kedudukan**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

I. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

II. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan Program;
2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

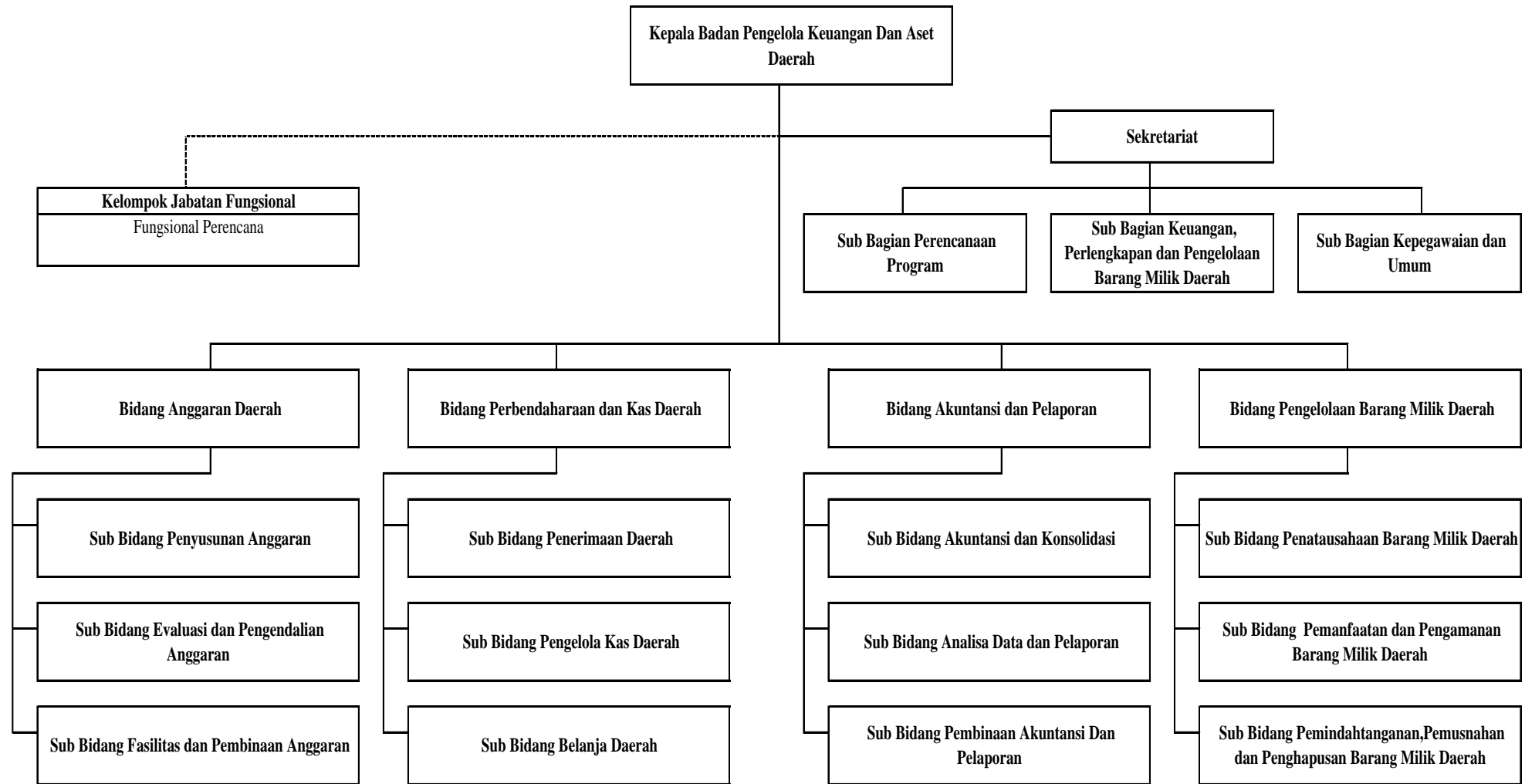
III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :



1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
  2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
  3. Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran
- IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
1. Subbidang Penerimaan Daerah;
  2. Subbidang Belanja Daerah;
  3. Subbidang Pengelola Kas Daerah.
- V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
  2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
  3. Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan
- VI. Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
  2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
  3. Subbidang Pemindah Tangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

**Gambar 1.1**  
 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016

## **E. Kondisi Strategis**

### **1. Eksternal**

Dari kondisi yang ada, maka diidentifikasi Rencana Strategis ke depan dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Secara umum aspek strategis organisasi yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

- a) Tuntutan perkembangan regulasi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dengan segala permasalahan yang semakin kompleks membutuhkan kesiapan SDM dalam aktifitas perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, pemeriksaan, serta tuntutan ganti rugi keuangan/barang daerah.
- b) Akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK-RI merupakan suatu prestasi yang harus dipertahankan.
- c) Semangat inovatif penguasaan ilmu teknologi informasi dalam penerapannya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus dikuasai pada jajaran aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang terus menerus berkembang melalui pembelajaran yang berkesinambungan (*learning organization*) serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- d) Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki sumbangan besar terhadap keberhasilan otonomi daerah dalam upaya memaksimalkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
- e) Penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah harus cepat bertransformasi seiring dengan perubahan regulasi-regulasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### **2. Internal**

#### **Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian**

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1****Data ASN BPKAD Provinsi Riau berdasarkan Jabatan Tahun 2019**

STRUKTURAL			FUNGSIONAL		JUMLAH
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	Umum	
1	5	15	8	112	141

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019

**Tabel 1.2****Data ASN BPKAD Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019**

NO	GOLONGAN/ PANGKAT	JUMLAH
1	IV	14
2	III	110
3	II	17
4	I	0
	<b>JUMLAH</b>	141

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019

**Tabel 1.3****Data ASN BPKAD Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019**

No.	PENDIDIKAN	Jumlah ( Orang )	%
1	Sarjana S2	31	22
2	Sarjana S1/D-IV	77	54
3	Diploma/D-III	15	11
4	SLTA (Sederajat)	17	12
5	SLTP (Sederajat)	1	1
6	SD (Sederajat)	0	0
	<b>JUMLAH</b>	141	100

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019

## **BAB II**

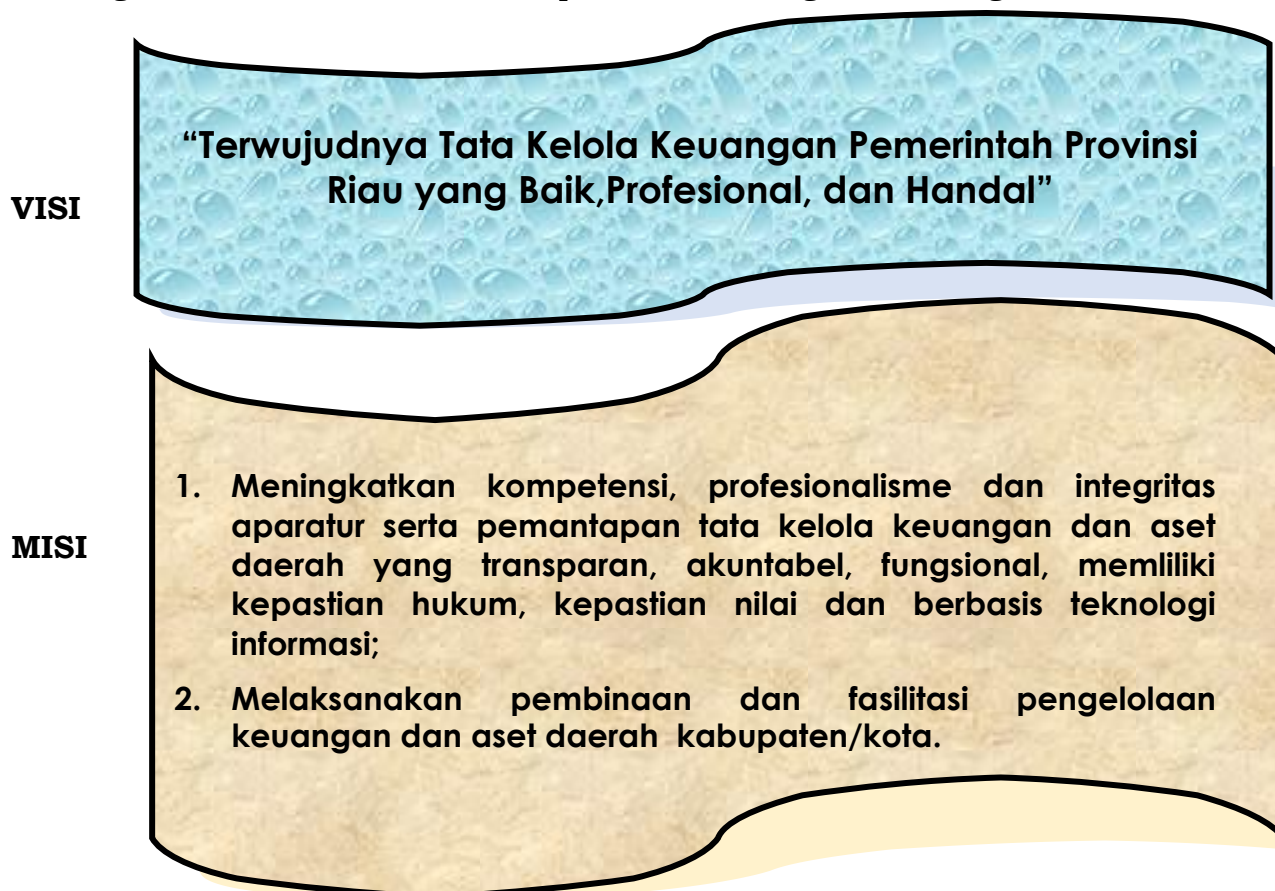
### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (Renstra)**

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen jangka menengah 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan startegis tersebut termuat didalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 12 / XI / 2018 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya yang menjadi acuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi



## **TUJUAN**

1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau;
2. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab/Kota

## **SASARAN**

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas;
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab/Kota yang berkualitas

### **Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah melakukan identifikasi dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja tahunan dalam dokumen Revisi Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Indikator Kinerja:

- ❖ Persentase kualitas penyusunan APBD/APBD-P sesuai ketentuan yang berlaku
- ❖ Persentase kualitas penatausahaan APBD/P sesuai ketentuan yang berlaku
- ❖ Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- ❖ Persentase Laporan Keuangan Provinsi Riau sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- ❖ Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Pedoman Evaluasi Permendagri

## 2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau

Indikator Kinerja:

- ❖ Persentase Kab/Kota yang Pengelolaan Keuangan dan Asetnya baik

### **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi :

- ✓ Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- ✓ Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- ✓ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- ✓ Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- ✓ Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 yang berisi 26 (dua puluh enam) indikator kinerja yang diwujudkan pada tahun 2019. Indikator kinerja tersebut telah mencakup indikator kinerja utama (IKU) untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 865/XII/2014, dan indikator lainnya yang relevan dengan sasaran program yang akan dicapai.



Rincian indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Penyusunan RKA/P dan DPA/P sesuai dengan regulasi yang ditetapkan	100%
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda APBD/P dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/P	100%
3	Persentase Ketersediaan Kas Daerah dalam pelaksanaan APBD/P Provinsi Riau	100%
4	Jumlah Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	2 Regulasi
5	Jumlah Ranperda dan Ranpergub tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun berjalan	2 Dokumen
6	Persentase Laporan Penerimaan dari SKPD penghasil yang Valid	100%
7	Persentase SP2D yang diterbitkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%
8	Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	100%
9	Persentase Penatausahaan BMD OPD sesuai ketentuan	100%
10	Persentase RKBMD OPD yang disusun tepat waktu	100%
11	Persentase Pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	100%
12	Persentase Pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan	100%
13	Persentase Pemusnahan BMD sesuai ketentuan	100%
14	Persentase Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%
15	Persentase meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara Pengelola BMD	90%
16	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	100%
17	Persentase Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
18	Persentase Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
19	Persentase Laporan Operasional (LO) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
20	Persentase Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
21	Persentase Catatan atas Laporan Keuangan (Calk) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
22	Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD konsisten dengan Perda APBD/APBD-P	100%
23	Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan LHP BPK	100%
24	Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi	3 Aplikasi
25	Persentase Kab/Kota yang Penyusunan Anggarannya berkualitas	100%
26	Persentase penyelesaian evaluasi APBD/LPP-APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu	100%

Untuk mewujudkan kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di dukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>4.016.586.245,00</b>
<b>2</b>	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>1.832.100.325,00</b>
<b>3</b>	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>998.065.900,00</b>
<b>4</b>	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<b>47.500.000,00</b>
<b>5</b>	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>17.033.185.042,50</b>
<b>6</b>	Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	<b>1.778.092.960,00</b>
<b>7</b>	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	<b>375.250.000,00</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran Kinerja digunakan dalam rentang waktu satu tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 berupa pengukuran dan pelaporan aspek pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan.

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 disajikan dalam bentuk uraian pencapaian sasaran yang disusun dari hasil pengukuran kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 serta perbandingannya dengan pencapaian tahun sebelumnya

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Sampai dengan akhir tahun 2019, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019. Tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2019**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKA/P dan DPA/P sesuai dengan regulasi yang ditetapkan	100%	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda APBD/P dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/P	100%	100%	100%
		Persentase Ketersediaan Kas Daerah dalam pelaksanaan APBD/P Provinsi Riau	100%	100%	100%
		Jumlah Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	2 Regulasi	2 Regulasi	100%
		Jumlah Ranperda dan Ranpergub tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun berjalan	2 Dokumen	2 Dokumen	72%
		Persentase Laporan Penerimaan dari SKPD penghasil yang Valid	100%	100%	100%
		Persentase SP2D yang diterbitkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	100%	87%	87%
		Persentase Penatausahaan BMD OPD sesuai ketentuan	100%	92.68%	92.68%
		Persentase RKBMD OPD yang disusun tepat waktu	100%	97.5%	97.5%
		Persentase Pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	100%	93%	93%
		Persentase Pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Pemusnahan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	91.66%	91.66%
		Persentase meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara Pengelola BMD	90%	100%	100%
	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		2	3	4	5
		Persentase Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Operasional (LO) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
		Persentase Catatan atas Laporan Keuangan (Calk) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
		Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD konsisten dengan Perda APBD/APBD-P	100%	100%	100%
		Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan LHP BPK	100%	100%	100%
		Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%
		Persentase Penyusunan RKA/P dan DPA/P sesuai dengan regulasi yang ditetapkan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota yang Berkualitas	Persentase Kab/Kota yang Penyusunan Anggarannya berkualitas	100%	96%	96%
		Persentase penyelesaian evaluasi APBD/LPP-APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu	100%	100%	100%

## B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang direncanakan (target) dengan realisasi kinerja untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisa ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dimasa yang akan datang.

**SASARAN 1 :** Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 26 (Dua Puluh Enam) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Penyusunan RKA/P dan DPA/P sesuai dengan regulasi yang ditetapkan	100%	100%	100%
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda APBD/P dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/P	100%	100%	100%
3	Persentase Ketersediaan Kas Daerah dalam pelaksanaan APBD/P Provinsi Riau	100%	100%	100%
4	Jumlah Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	2 Regulasi	2 Regulasi	100%
5	Jumlah Ranperda dan Ranpergub tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun berjalan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
6	Persentase Laporan Penerimaan dari SKPD penghasil yang Valid	100%	100%	100%
7	Persentase SP2D yang diterbitkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%
8	Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	100%	87%	87%
9	Persentase Penatausahaan BMD OPD sesuai ketentuan	100%	92.68%	92.68%
10	Persentase RKBMD OPD yang disusun tepat waktu	100%	97.5%	97.5%

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
11	Persentase Pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	100%	93%	93%
12	Persentase Pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%
13	Persentase Pemusnahan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%
14	Persentase Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	91.66%	91.66%
15	Persentase meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara Pengelola BMD	90%	100%	100%
16	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
17	Persentase Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
18	Persentase Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
19	Persentase Laporan Operasional (LO) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
20	Persentase Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
21	Persentase Catatan atas Laporan Keuangan (Calk) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
22	Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD konsisten dengan Perda APBD/APBD-P	100%	100%	100%
23	Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan LHP BPK	100%	100%	100%
24	Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%
25	Persentase Penyusunan RKA/P dan DPA/P sesuai dengan regulasi yang ditetapkan	100%	100%	100%
Rata-rata capaian (%)				98.47

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada tabel 3.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas adalah 98,47%.Pencapaian rata-rata indikator kinerja tersebut



termasuk dalam kategori amat baik. Upaya pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, terdapat 25 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dapat kita lihat dalam tabel 3.2 diatas masih ada beberapa indikator yang pencapaiannya kurang dari 100%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan. Rincian pencapaian dari 25 indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyusunan RKA/P dan DPA/P sesuai dengan regulasi yang ditetapkan sebesar 100%, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun RKA/P dan DPA/P sesuai dengan format pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.
2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda APBD/P dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/P Sebesar 100% hal ini sudah sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Permendagri tersebut Penyampaian Rancangan Peraturah daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu ke dua bulan September. Selanjutnya dilakukan Pembahasan Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat akhir Desember (31 Desember). Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2020 pada tanggal 27 Desember 2019. Hal ini seiring dengan Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD kepada DPRD dilaksanakan paling lambat minggu ke dua bulan September dan Pengesahan Dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Oktober 2019. Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahn APBD Provinsi Riau Tahun 2019 pada tanggal 18 September 2019.

3. Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Kas Daerah dalam pelaksanaan APBD/P Provinsi Riau adalah sebesar 100%. Jumlah realisasi anggaran yang dapat dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 8.746.413.953.081. dengan persentase 92.12% dari Jumlah APBD Provinsi Riau Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 9.494.326.252.025., dengan jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan jumlah SP2d yang diterbitkan dengan Nomor SP2D terakhir 15.933.
4. Jumlah Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun Capaian Indikator Kinerja Jumlah paket regulasi mengenai keuangan Provinsi Riau yang tersusun sebanyak 2 Regulasi dari 2 Regulasi yang ditargetkan, berarti capaian indikator kerjanya sebesar 100%. Regulasi yang telah disusun adalah sebagai berikut :
  - a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
  - b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
5. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Ranperda dan Ranpergub tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun berjalan adalah 100 % dengan realisasi 2 dokumen Pergub yang terlaksana penyusunannya.
6. Capaian Indikator Kinerja Laporan Penerimaan dari SKPD penghasil yang Valid sebesar 100%. Dari 40 OPD terdapat 26 OPD yang ditargetkan sebagai OPD Penghasil Penerimaan Daerah.
7. Capaian Indikator Kinerja Penerbitan SP2D sesuai Ketentuan dan tepat waktu sebesar 100%. Berdasarkan Pasal 129 ayat (6) Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Memproses SPM dengan Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling 2 (Dua) Hari sejak Tanggal Diterimanya SPM. Berkenaan Dengan waktu dua Hari tersebut diatas SPM yang diproses apabila persyaratan dan kelengkapan yang telah ditentukan telah terpenuhi.

8. Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan adalah sebesar 87% dengan formulasi realisasi penilaiannya 2 indikator penilaian yaitu jumlah lokasi plang yang dipasang, dan jumlah BMD yang di pelihara. Dari 18 unit lokasi pemasangan plang, dan 6 lokasi pemeliharaan BMD yang ditargetkan dapat direalisasikan sebanyak 15 lokasi pemasangan plang, dan 6 lokasi pemeliharaan dengan capaian realisasi fisik 87%.
9. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penatausahaan BMD OPD sesuai ketentuan adalah sebesar 92.68% dari 40 OPD ditambah dengan 1 Pengelolaan yang melaksanakan Penatausahaan sesuai ketentuan terdapat 38 OPD yang melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Capaian Indikator Kinerja Persentase RKBMD OPD yang disusun tepat waktu sebesar 97.5% dengan realisasi 39 OPD yang tepat waktu dari 40 OPD di Provinsi Riau. Capaian ini diukur dengan formulasi ketepatan waktu penyampaian RKBMD kepengelola aset Provinsi Riau.
11. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan BMD sesuai ketentuan sebesar 93%, dapat dijabarkan dari 117 usulan pemanfaatan BMD telah direalisasikan sebanyak 108 pemanfaatan BMD.
12. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan sebesar 100%. Target pemindahtanganan BMD Provinsi Riau pada tahun 2019 sebanyak 36 BMD, sedangkan yang telah direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 36 BMD, dengan demikian pencapaian indikator kinerja Pemindahantanganan BMD mencapai 100% sebagaimana target yang telah ditetapkan.
13. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemusnahan BMD sesuai ketentuan adalah sebesar 100% dari 2 yang diusulkan untuk dilaksanakan pemusnahan BMD terdapat 2 usulan yang dilaksanakan pemusnahan BMD.
14. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penghapusan BMD sesuai ketentuan sebesar 91.66% dari 12 yang diusulkan untuk dihapuskan, terdapat 11 usulan penghapusan BMD yang dilaksanakan.
15. Capaian Indikator Kinerja Persentase meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara Pengelola BMD adalah sebesar 133% dengan peserta yang hadir/mengikuti 120 peserta dari 90 peserta yang di targetkan hadir atau mengikuti pelatihan pengelolaan BMD.

16. Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan jumlah OPD yang menyelesaikan laporan tepat waktu sebanyak 40 OPD dari 40 OPD yang ditargetkan. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun 2019 ke Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Riau dilaksanakan pada Tanggal 12 Maret 2020, ini telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah disampaikan paling lambat 3 Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
17. Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebesar 100%. Persentase laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah selesai sebanyak 40 OPD dari 40 OPD yang telah ditargetkan.
18. Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah 100%. Persentase Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah mencapai indikator sebesar 100%.
19. Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Operasional (LO) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebesar 100% telah mencapai target capaian indikator untuk Kinerja Persentase Laporan Operasional (LO) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
20. Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah mencapai target indikator yang telah ditetapkan yaitu 100%.
21. Capaian Indikator Kinerja Persentase Catatan Laporan Keuangan (CALK) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebesar 100%
22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD konsisten dengan Perda APBD/APBD-P sebesar 100% telah mencapai target indikator yaitu 1 Ranperda.
23. Capaian Indikator Kinerja Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan LHP BPK sebesar 100% telah mencapai target indikator yaitu 1 Ranperda.
24. Capaian Indikator Kinerja Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi adalah sebesar 100%. Aplikasi yang sudah terintegrasi atau yang telah

ditargetkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 3 aplikasi yaitu Aplikasi Modul Anggaran, Aplikasi Modul SIPKD Penatausahaan dan Aplikasi Modul BMD

25. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyusunan RKA/P dan DPA/P sesuai dengan regulasi yang ditetapkan adalah sebesar 100%, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun RKA/P dan DPA/P sesuai dengan format pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

**SASARAN 2 :** Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
26	Persentase Kab/Kota yang Penyusunan Anggarannya berkualitas	100%	91.6%	91.6%
27	Persentase penyelesaian evaluasi APBD/LPP-APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata capaian (%)				95.8 %

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada tabel 3.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja dalam rangka Peningkatan Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau adalah 95.8 %.Pencapaian rata-rata indikator kinerja tersebut termasuk dalam kategori amat baik.

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, terdapat 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dapat kita lihat dalam tabel 3.3 diatas masih ada 1 indikator yang pencapaiannya kurang dari 100%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan

kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan. Rincian pencapaian dari 2 indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang Penyusunan Anggarannya berkualitas sebesar 91,6%. Capaian ini diperoleh dari 12 kab/kota yang dibina dan dievaluasi dalam penyusunan anggaran, terdapat 11 Kab/Kota yang telah melaksanakan pembinaan dan evaluasi Ranperda APBD sesuai waktu yang telah ditentukan berdasarkan regulasi yang berlaku.
2. Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian evaluasi APBD/LPP-APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu sebesar 100% dari 12 Kab/Kota yang dibina, terdapat 12 Kab/Kota penyelesaian evaluasi APBD/LPP-APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu.

### **C. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN KEGIATAN**

Pada tahun anggaran 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau memperoleh alokasi anggaran dari APBD Provinsi sebesar Rp. 26.080.780.472,50,- (Dua puluh enam milyar delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua lima puluh rupiah). Anggaran ini di alokasi untuk 7 (Tujuh) program dan 64 (enam puluh empat) kegiatan, secara keseluruhan realisasi fisik dan keuangan tahun anggaran 2019 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Pagu Anggaran BPKAD	: Rp. 26.080.780.472,50,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 21.467.337.472,00,- (82,31 %)
Realisasi Fisik	: (84,45 %)
Sisa Anggaran	: Rp. 4.613.443.000,50,- (17,69%)

Dari realisasi yang tercapai pada tahun 2019 ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, untuk lebih jelasnya realisasi keuangan dan fisik ini dapat dilihat secara lebih rinci sesuai dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019. Adapun sasaran Program dan Kegiatan sebagai berikut:

**SASARAN 1 :** Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Sasaran pertama adalah Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang mana dalam pencapaian target didukung oleh beberapa Program yaitu :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan : 1 (satu) kegiatan
2. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : 33 (Tiga puluh tiga) kegiatan
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH : 1 (satu) kegiatan

Seperti yang tergambar dalam daftar dibawah ini. Adapun realisasi keuangan dan fisik pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam sasaran pertama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 43.058.900,00,- (Empat puluh tiga juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) untuk pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 90,65 % dan untuk pencapaian realisasi fisik adalah sebesar 100%, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Keuangan dan Fisik Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	
			Keuangan (Rp.)	%		(Rp.)	%
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>925.544.000,00</b>	<b>572.924.400,00</b>	<b>70,62</b>	<b>100,00</b>	<b>352.619.600,00</b>	<b>38,10</b>
1	Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) SKPD	47.500.000,00	43.058.900,00	90,65	100,00	4.441.100,00	9,35

Realisasi keuangan dan fisik pada program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam sasaran pertama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **17.033.185.042,50,-** (Tujuh belas milyar tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh lima empat puluh dua koma lima puluh rupiah) untuk pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 77,00% dan untuk pencapaian realisasi



fisik adalah sebesar 80,00%, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	
			Keuangan (Rp.)	%		(Rp.)	%
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>17.033.185.042,50</b>	<b>13.207.765.068,00</b>	<b>77,00</b>	<b>80,00</b>	<b>3.825.419.974,00</b>	<b>20,00</b>
1	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	275.500.000,00	275.082.043,00	99	100	417.957,00	1
2	Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah	296.400.000,00	295.659.100,00	99	100	740.900,00	1
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	373.053.505,00	294.032.770,00	78	78	79.020.735,00	22
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.	1.436.880.000,00	1.231.267.436,00	85	86	205.612.564,00	15
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	935.900.000,00	776.389.359,00	82	84	159.510.641,00	18
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	645.305.265,00	589.013.238,00	91	100	56.292.027,00	9
7	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD	694.622.000,00	657.764.510,00	94	100	36.857.490,00	6
8	Penyusunan, Desiminasi, Dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	348.390.000,00	334.648.702,00	96	100	13.741.298,00	4
9	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	351.434.450,00	-	-	-	351.434.450,00	-
10	Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau	403.750.000,00	393.027.777,00	97	100	10.722.223,00	3
11	Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	337.250.000,00	291.632.050,00	86	87	45.617.950,00	14
12	Penyusunan Keputusan KDH Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	237.500.000,00	145.604.800,00	61	75	91.895.200,00	39
13	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	394.250.000,00	56.411.500,00	14	53	337.838.500,00	86
14	Rekonsiliasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	403.750.000,00	248.301.800,00	61	83	155.448.200,00	39
15	Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	213.750.000,00	121.057.320,00	56	77	92.692.680,00	44

16	Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	1.078.294.000,00	1.049.238.600,00	97	100	29.055.400,00	3
17	Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	237.500.000,00	209.440.000,00	88	89	28.060.000,00	12
18	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Berjalan	184.393.053,00	175.292.562,00	95	100	9.100.491,00	5
19	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua	403.750.000,00	202.345.400,00	50	63	201.404.600,00	50
20	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	987.558.100,00	752.730.700,00	76	86	234.827.400,00	24
21	Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi	215.042.000,00	176.112.366,00	81	86	38.929.634,00	19
22	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	2.412.447.000,00	2.293.964.000,00	95	100	265.064.000,00	5
23	Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Investasi Keuangan Daerah	216.601.045,00	126.174.700,00	58	65	90.426.345,00	42
24	Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer	649.159.600,00	244.017.200,00	37	81	405.142.400,00	63
25	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)	427.272.000,00	181.206.191,00	42	58	246.065.809,00	58
26	Pemantapan Kapasitas Aparatur Penyusunan Anggaran BLUD	189.209.600,00	185.534.486,00	98	100	3.675.114,00	2
27	Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah	354.125.800,00	74.935.900,00	21	65	279.189.900,00	79
28	Pengamanan Hukum Barang Milik Daerah	942.048.600,00	860.536.393,00	91	100	81.512.207,00	9
29	Penilaian Barang Milik Daerah	362.661.075,00	256.678.772,00	70	70	105.982.303,00	30
30	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota	181.450.000,00	173.532.096,00	95	100	7.917.904,00	5
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	402.478.900,00	359.275.759,00	89	87	43.203.141,00	11
32	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Pengelola Barang	100.343.750,00	-	-	-	100.343.750,00	-
33	Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi NonTunai	217.404.650,00	176.857.538,00	81	81	40.547.112,00	19

Realisasi keuangan dan fisik pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam sasaran pertama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **375.250.000,00,-** (Tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 82,00 % dan untuk

pencapaian realisasi fisik adalah sebesar 100 %, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6**

**Realisasi Keuangan dan Fisik Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	
			Keuangan (Rp.)	%		(Rp.)	%
	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>375.250.000,00</b>	<b>309.976.133,00</b>	<b>82,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65.273.867,00</b>	<b>18,00</b>
1	Pelaksanaan Operasional Penertiban, Pengawasan Internal Dan Pembinaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau	375.250.000,00	309.976.133,00	82,00	100,00	65.273.867,00	18,00

Realisasi keuangan dan fisik pada program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam sasaran pertama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 602.872.600,00,- (Enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) untuk pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 68,64 % dan untuk pencapaian realisasi fisik adalah sebesar 100 %, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**SASARAN 2 :** Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau

Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau dengan dukungan program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota yang didukung oleh 6 (enam) kegiatan. Pada sasaran kedua ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.778.092.960,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) untuk pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 88,00 % dan untuk pencapaian realisasi fisik adalah sebesar 100,00%, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Keuangan dan Fisik Program Pembinaan dan Fasilitas**  
**Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	
			Keuangan (Rp.)	%		(Rp.)	%
	<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.778.092.960,00</b>	<b>1.582.234.577,00</b>	<b>88,00</b>	<b>92,00</b>	<b>195.585.383,00</b>	<b>12,00</b>
1.	Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota.	558.393.275,00	532.373.469,00	95	100	26.019.806,00	5
2	Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	188.247.060,00	157.486.737,00	83	83	30.760.323,00	17
3	Pembinaan Pertanggung Jawaban Keuangan Kabupaten/Kota	185.250.000,00	155.768.050,00	84	88	29.481.950,00	16
4	Koordinasi Dan Evaluasi Anggaran BLUD	424.916.290,00	372.424.235,00	87	91	52.492.050,00	13
5	Rekonsiliasi Data Anggaran Kabupaten/Kota	192.542.675,00	139.437.982,00	72	92	53.104.693,00	28
6	Pembinaan Anggaran Kab/Kota	228.743.660,00	224.744.104,00	98	100	3.999.556,00	2

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selama kurun waktu tahun 2019 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*.

Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2019 telah berhasil dengan baik, Keberhasilan tersebut disebabkan antara lain :

1. Tersedia anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan;
2. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
3. Adanya komitmen bersama antara Tim Pelaksana Kegiatan;
4. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain :

1. Masih ada OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau yang belum mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan.
2. Masih adanya OPD yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
3. Masih ada Kab/Kota yang belum mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan.
4. Belum ditetapkannya Standar Operasional Prosedur dalam Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
5. Proses Penghapusan Belum Berjalan Dengan Baik. Salah satu sebab kurang baiknya Laporan Barang Milik Daerah adalah, banyaknya selisih antara jumlah barang di buku dengan jumlah barang yang sebenarnya.

6. Adanya OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan/Laporan Barang Milik Daerah OPD yang melewati tanggal batas akhir pelaporan.
7. Ada satu Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA)
8. Masih adanya Aset Pemerintah provinsi riau yang belum termanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.